



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. DARMANSYAH HASIBUAN
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 86908

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1.315.000.000

1. Bangunan Seluas 180 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
2. Tanah Seluas 45000 m2 di PADANG LAWAS UTARA, WARISAN Rp. 220.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di PADANG LAWAS UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di PADANG LAWAS UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 30000 m2 di PADANG LAWAS UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
7. Tanah Seluas 400 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

194.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS SPORTIVO TRD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

57.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

305.832.673



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.872.332.673
III. HUTANG	Rp.	304.499.977
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.567.832.696

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.